



LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 000.8.6.3/55/415.18/2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IMAM BUSTOMI, S.T.
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. WARSUBI, S.H., M.Si.
Jabatan : Bupati Jombang
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jombang, 19 Januari 2026

Pihak Kedua
Bupati Jombang
Ditandatangani secara elektronik



WARSUBI, SH., M.Si

Pihak Pertama
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Ditandatangani secara elektronik



IMAM BUSTOMI, ST
NIP 197710262001121003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN JOMBANG

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks capaian layanan dan pembangunan infrastruktur sektor pekerjaan umum	0.6683
1.1	Meningkatnya penyelenggaraan infrastruktur jalan, air irigasi	Cakupan Layanan Jalan dan Sumber Daya Air dengan persentase 70%	53.07%
1.2	Meningkatnya layanan bangunan gedung dan penyelenggaraan penataan ruang	Cakupan layanan bangunan gedung dan penataan ruang dengan persentase 30%	13.76%
1.3	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80.18

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 74.500.420.822,00	APBD
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Rp. 5.764.643.471,50	APBD
3.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 1.482.026.988,00	APBD
4.	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rp. 89.105.694,00	APBD
5.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 622.743.344,00	APBD
6.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 3.136.757.339,60	APBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
7.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp. 37.333.000,00	APBD
8.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 25.451.622.196,00	APBD

Jombang, 19 Januari 2026

Pihak Kedua
Bupati Jombang
Ditandatangani secara elektronik



WARSUBI, SH., M.Si

Pihak Pertama
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Ditandatangani secara elektronik



IMAM BUSTOMI, ST
NIP 197710262001121003



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 000.8.6.3/1911/415.18/2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BAYU PANCOROADI, S.T., M.T.
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Jombang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. WARSUBI, S.H., M.Si.
Jabatan : Bupati Jombang
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jombang, 25 September 2025

Pihak Kedua
Bupati Jombang
Ditandatangani secara elektronik



WARSUBI, SH., M.Si

Pihak Pertama
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Ditandatangani secara elektronik



BAYU PANCOROADI, ST., MT.
NIP 197412092003121002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN JOMBANG**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks capaian layanan dan pembangunan infrastruktur sektor pekerjaan umum	0,6487
1.1	Meningkatnya penyelenggaraan infrastruktur jalan, air irigasi	Cakupan Layanan Jalan dan Sumber Daya Air dengan persentase 70%	52,37%
1.2	Meningkatnya layanan bangunan gedung dan penyelenggaraan penataan ruang	Cakupan layanan bangunan gedung dan penataan ruang dengan persentase 30%	12,51%
1.3	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80,01%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 179.112.019.364,58	APBD
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Rp. 21.741.346.538,00	APBD
3.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 26.472.655.854,00	APBD
4.	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rp. 399.853.080,00	APBD
5.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 1.908.642.040,00	APBD
6.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 3.944.564.050,00	APBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
7.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp. 157.139.750,00	APBD
8.	Program Penatagunaan Tanah	Rp. 153.580.000,00	APBD
9.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 33.074.646.638,00	APBD

Jombang, 25 September 2025

Pihak Kedua
Bupati Jombang
Ditandatangani secara elektronik



WARSUBI, SH., M.Si

Pihak Pertama
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Ditandatangani secara elektronik



BAYU PANCOROADI, ST., MT.
NIP 197412092003121002

RENCANA AKSI
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN JOMBANG

Nama : BAYU PANCOROADI
NIP : 197412092003121002
Pangkat/Gol Ruang : Pembina Tingkat I / IV/b
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana Hasil Kerja :

Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif

Indikator :

1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Tribulan 1 :

Renaksi

-

Tribulan 2 :

Renaksi

-

Tribulan 3 :

Renaksi

-

Tribulan 4 :

Renaksi

1. Melaksanakan tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif pada perangkat daerah

Target : 80.01 %

Rencana Hasil Kerja :

Meningkatnya penyelenggaraan infrastruktur jalan, air irigasi

Indikator :

1. Cakupan Layanan Jalan dan Sumber Daya Air dengan persentase 70%

Tribulan 1 :

Renaksi

-

Tribulan 2 :

Renaksi

-

Tribulan 3 :

Renaksi

-

Tribulan 4 :

Renaksi

1. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pembinaan terhadap penyelenggaraan infrastruktur jalan dan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan pembagian air irigasi sesuai dengan RTTG melalui dokumen operasi (blangko O) dari masing - masing UPT PSDA

Target : 52.37 %

Rencana Hasil Kerja :

Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum

Indikator :

1. Indeks capaian layanan dan pembangunan infrastruktur sektor pekerjaan umum

Tribulan 1 :

Renaksi

-

Tribulan 2 :

Renaksi

-

Tribulan 3 :

Renaksi

-

Tribulan 4 :

Renaksi

1. Melaksanakan supervisi terhadap layanan dan pembangunan infrastruktur sektor PU

Target : 0.6487

Rencana Hasil Kerja :

Meningkatnya layanan bangunan gedung dan penyelenggaraan penataan ruang

Indikator :

1. Cakupan layanan bangunan gedung dan penataan ruang dengan persentase 30%

Tribulan 1 :**Renaksi**

-

Tribulan 2 :**Renaksi**

-

Tribulan 3 :**Renaksi**

-

Tribulan 4 :**Renaksi**

1. Melakukan monitoring dan evaluasi dokumen rekomendasi teknis PBG dan SLF dan monitoring evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang untuk pembangunan daerah yang sesuai dengan rencana tata ruang

Target : 12.51 %

**KERTAS KERJA PENETAPAN TARGET
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN JOMBANG**

Nama : BAYU PANCORADI

NIP : 197412092003121002

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tugas pokok : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Jombang di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- e. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
- f. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

No	Indikator Kinerja Utama/ Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan Program/ Kegiatan/	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Satuan	Analisi/Dasar Penetapan
1	Indeks capaian layanan dan pembangunan infrastruktur sektor pekerjaan umum	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum	0	0	0.6487		(Cakupan Layanan jalan, air irigasi 70%)+(Cakupan Layanan bangunan gedung dan penataan ruang 30%)
2	Cakupan Layanan Jalan dan Sumber Daya Air dengan persentase 70%	Meningkatnya penyelenggaraan infrastruktur jalan, air irigasi	0	0	52.37	%	Analisis: - Penetapan target kinerja untuk penyelenggaraan infrastruktur jalan berdasarkan Permen PUPR No. 13/PRT/M/2011 Tentang tata cara pemeliharaan dan penilaian jalan dimana : "Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu" - Penetapan target kinerja untuk penyelenggaraan air irigasi didapatkan dari jumlah bendung irigasi dalam kondisi baik (kerusakan ringan >20%) dibandingkan dengan jumlah total bendung kewenangan kabupaten jombang ditambah panjang jaringan irigasi irigasi dalam kondisi baik dibanding panjang total jaringan irigasi kewenangan Kabupaten Jombang. Dasar Penetapan: ((60% x Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap / Jumlah total panjang jalan) + (40% x rata-rata jaringan irigasi dan bendung irigasi dalam kondisi baik))

No	Indikator Kinerja Utama/ Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan Program/ Kegiatan/	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Satuan	Analisi/Dasar Penetapan
3	Cakupan layanan bangunan gedung dan penataan ruang dengan persentase 30%	Meningkatnya layanan bangunan gedung dan penyelenggaraan penataan ruang	0	0	12.51	%	<p>Analisis: Tata Ruang Penetapan target kinerja untuk program penyelenggaraan penataan ruang adalah nilai indeks penyelenggaraan penataan ruang sebesar 79,52%, yang dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut: 1. Dari sisi faktor internal, penyesuaian ini mempertimbangkan target kinerja sebelumnya bahwa presentase kesesuaian pemanfaatan ruang belum mengakomodir seluruh aspek kinerja penyelenggaraan penataan ruang, sehingga perlu penyesuaian indikator agar dapat merepresentasikan dukungan terhadap keterwujudan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang. Penyesuaian penetapan target mengacu pada hasil penilaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten/Kota Tahun 2024 oleh Kementerian ATR/BPN, Kabupaten Jombang mendapat predikat baik dengan indeks penyelenggaraan penataan ruang 50 s.d 80. 2. Dari sisi faktor eksternal, penyesuaian ini juga merujuk pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2021 bahwa indeks penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mengukur dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan penataan ruang secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan berdasarkan aspek Perencanaan Tata Ruang, Pembinaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Tata Bangunan Penjumlahan indeks bangunan gedung negara yang memenuhi standar teknis yaitu Bangunan Gedung Negara yang memiliki Dokumen Teknis (Legger, PBG, dan SLF) Dasar Penetapan: $((35\% \times (\text{Jumlah bangunan gedung negara di Kab. Jombang yang memiliki legger} \times 30\% + \text{Jumlah bangunan gedung negara di Kab. Jombang yang memiliki PBG} \times 40\% + \text{Jumlah bangunan gedung negara di Kab. Jombang yang memiliki SLF} \times 30\% / \text{Jumlah keseluruhan bangunan gedung negara Kab. Jombang})) + (65\% \times \text{Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang}))$</p>
4	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	0	0	80.01	%	<p>Analisis: Sitem pengukuran tata kelola pemerintahan daerah menuju birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani publik. Dasar Penetapan: Hasil evaluasi RB tahun - n</p>

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN JOMBANG

Nama : BAYU PANCORADI

NIP : 197412092003121002

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tugas pokok : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Jombang di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- e. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
- f. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
1	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Menggambarkan perbaikan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dari KKN, dan layanan publik yang berkualitas	Hasil evaluasi RB tahun - n	Nilai RB tahun - n
2	Meningkatnya penyelenggaraan infrastruktur jalan, air irigasi	Cakupan Layanan Jalan dan Sumber Daya Air dengan persentase 70%	Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu (PermenPU/13/Tahun 2011). Kondisi jaringan irigasi dan bendung irigasi ditetapkan melalui hasil perhitungan yang didasarkan pada survey lapangan. Sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2015, sedangkan kebutuhan air ditetapkan berdasarkan perhitungan rencana kebutuhan air dalam dokumen rencana tata tanam global.	((60% x Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap / Jumlah total panjang jalan) + (40% x rata-rata jaringan irigasi dan bendung irigasi dalam kondisi baik))	-Jumlah bangunan irigasi kewenangan Kabupaten Jombang - panjang jaringan irigasi kewenangan Kabupaten Jombang - Data Dasar Jalan
3	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks capaian layanan dan pembangunan infrastruktur sektor pekerjaan umum	Indeks capaian layanan dan pembangunan infrastruktur sektor pekerjaan umum merupakan penjumlahan dari cakupan layanan jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap, ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air serta cakupan layanan bangunan gedung dan penataan ruang	(Cakupan Layanan jalan, air irigasi 70%)+(Cakupan Layanan bangunan gedung dan penataan ruang 30%)	Laporan Data Bidang (Sumber Daya Air, Bina Marga, Tata Ruang, dan Tata Bangunan)

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
4	Meningkatnya layanan bangunan gedung dan penyelenggaraan penataan ruang	Cakupan layanan bangunan gedung dan penataan ruang dengan persentase 30%	<p>Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang (IPPR) adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan dan program penataan ruang di suatu wilayah berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Merujuk pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2021, indeks ini menggambarkan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan penataan ruang yang terencana, terstruktur, dan berkelanjutan berdasarkan aspek Perencanaan Tata Ruang, Pembinaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang</p> <p>Proses penghitungan IPPR melalui beberapa tahapan. - Cakupan layanan penataan ruang dihitung dari indeks penyelenggaraan penataan ruang dikalikan bobotnya yaitu sebesar 65%. Perhitungan indeks penyelenggaraan penataan ruang diperoleh dari formula berikut: (25% persentase penilaian perencanaan tata ruang +25% persentase penilaian pembinaan tata ruang+ 25% persentase pemanfaatan ruang + 25% persentase penilaian pengendalian pemanfaatan ruang) dikali 100.</p> <p>a. Penilaian Perencanaan tata ruang diukur dari ketersediaan dokumen rencana tata ruang dalam 1 tahun b. Penilaian Pembinaan penataan ruang diukur dari kegiatan pembinaan penataan ruang yang dilaksanakan dalam 1 tahun c. Penilaian Pemanfaatan Ruang diukur dari pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang, yang diukur dari jumlah penerbitan KKPR dalam 1 tahun d. Penilaian Pengendalian Pemanfaatan Ruang diukur dari ketersediaan dokumen penilaian pelaksanaan KKPR dan pernyataan mandiri pelaku UMK serta ketersediaan laporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang dalam 1 tahun.</p> <p>Perbandingan antara Bangunan Gedung Negara di Kabupaten Jombang yang memiliki Dokumen Teknis (Legger, PBG, dan SLF) dibandingkan dengan jumlah seluruh Bangunan Gedung Negara di Kabupaten Jombang. - Dokumen Legger adalah dokumen perkembangan bangunan gedung. - Dokumen PBG adalah Persetujuan Bangunan Gedung yaitu perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. - Dokumen SLF adalah Sertifikat Laik Fungsi yaitu sertifikat yang menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.</p>	$((35\% \times (\text{Jumlah bangunan gedung negara di Kab. Jombang yang memiliki legger} \times 30\% + \text{Jumlah bangunan gedung negara di Kab. Jombang yang memiliki PBG} \times 40\% + \text{Jumlah bangunan gedung negara di Kab. Jombang yang memiliki SLF} \times 30\% / \text{Jumlah keseluruhan bangunan gedung negara Kab. Jombang})) + (65\% \times \text{Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang}))$	<p>Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang untuk pembangunan daerah yang sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Jombang pada Tahun 2025 dengan rincian data sebagai berikut: - Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Tata Ruang - Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Tata Ruang - Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang - Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang - Data permohonan PBG dan SLF; - Data Bangunan Gedung Negara di Kabupaten Jombang</p>

PENGUKURAN KINERJA

TRIBUNAN 4

Nama : BAYU PANCOROADI
 NIP : 197412092003121002
 Pangkat/Gol Ruang : Pembina Tingkat I / IV/b
 Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI s.d TRIBULAN X	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN				PENJELASAN	ALTERNATIF / UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN	
						NO	Nama Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			Realisasi (%)
1	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks capaian layanan dan pembangunan infrastruktur sektor pekerjaan umum	0.6487	0.6623	102.10%	1	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Rp 268.104.895.314,58	Rp 245.679.924.217,84	91.64%	<p>Indeks capaian layanan dan pembangunan infrastruktur sektor pekerjaan umum adalah angka indeks gabungan dari 70% cakupan layanan jalan dan sumber daya air, serta Cakupan layanan bangunan gedung dan penataan ruang dengan persentase 30%. Proporsi antara bina marga dengan sumber daya air untuk mencapai angka 70% adalah Bina Marga 60% dan Sumberdaya air 40%, sedangkan Cakupan layanan bangunan gedung dan penataan ruang dengan persentase 30% didukung oleh capaian bidang Tata ruang dan Bangunan masing-masing proporsi kontribusinya adalah 65% untuk tata ruang dan 35 untuk tata bangunan. Hasil dari perhitungan setiap capaian bidang dikalikan dengan bobot yang kemudian dijumlahkan menjadi hasil atas Indeks Capaian Layanan dan Pembangunan Infrastruktur Sektor Pekerjaan Umum. Hasil tahun 2025 menunjukkan angka yang lebih tinggi daripada target yang ditetapkan yaitu sebesar 0,6623 yang merupakan hasil dari penghitungan indeks atas capaian 4 bidang yang ada di</p>	<p>A. Upaya yang telah dilakukan - Dinas PUPR Kabupaten Jombang telah melaksanakan berbagai upaya strategis, antara lain melalui penyusunan perencanaan teknis yang lebih berbasis kondisi riil lapangan, pemanfaatan data survei jalan dan jembatan sebagai dasar penentuan prioritas, serta peningkatan kualitas pelaksanaan pekerjaan konstruksi pada sektor sumber daya air, bina marga, tata ruang dan bangunan. - Optimalisasi penyerapan anggaran dengan mempercepat proses pengadaan dan pelaksanaan fisik, meningkatkan koordinasi lintas bidang, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres fisik dan keuangan. B. Faktor Penghambat/Keberhasilan Faktor Keberhasilan: - Ketersediaan perencanaan teknis yang lebih matang dan selaras dengan kebutuhan masyarakat. - Komitmen seluruh bidang dalam menjaga kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan. - Peningkatan efektivitas koordinasi internal serta dukungan pimpinan dalam pengambilan keputusan strategis. - Optimalisasi pemanfaatan anggaran serta pengendalian mutu pekerjaan yang lebih ketat. Faktor Penghambat: - Keterbatasan sumber daya manusia teknis dan peralatan survei pada beberapa bidang. - Kondisi cuaca dan kendala lapangan yang mempengaruhi waktu pelaksanaan pekerjaan fisik. C. Upaya perbaikan Kedepan - Penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital, serta penajaman skala prioritas kegiatan agar alokasi anggaran semakin tepat sasaran. Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga konsistensi kualitas layanan infrastruktur dan mendorong peningkatan nilai indeks pada periode</p>

									Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)	perencanaan berikutnya.	
2	Meningkatnya penyelenggaraan infrastruktur jalan, air irigasi	Cakupan Layanan Jalan dan Sumber Daya Air dengan persentase 70%	52.37 %	52.63 %	100.50 %	2	Meningkatnya penyelenggaraan infrastruktur jalan, air irigasi	Rp 201.993.813.902,58	Rp 185.073.267.561,37	91.62 %	<p>Pada Tahun 2025, indikator kinerja "Cakupan Layanan Jalan dan Sumber Daya Air" ditetapkan sebesar 52,37% dan berhasil direalisasikan sebesar 52,63%. Realisasi tersebut dicapai melalui kontribusi lintas bidang, yaitu Bidang Sumber Daya Air sebesar 40% dan Bidang Bina Marga sebesar 60%. Kontribusi Bidang Sumber Daya Air dicapai melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pembagian air irigasi sesuai Rencana Tata Tanam Global (RTTG) yang didukung dokumen operasi Blangko O dari UPT PSDA. Hasil verifikasi dan analisis data menunjukkan realisasi pembagian air irigasi sebesar 74,2%, sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga capaian kinerja Bidang SDA mencapai 100%. Dengan bobot kontribusi sebesar 40%, maka nilai kontribusi Bidang SDA terhadap indikator kinerja adalah sebesar 40%. Sementara itu, kontribusi Bidang Bina Marga berasal dari peningkatan cakupan layanan jalan kabupaten, dimana persentase jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang) mencapai 75,84% dari target 75,22%, sehingga capaian kinerja Bidang Bina Marga sebesar 100,83%. Dengan bobot kontribusi sebesar 60%, maka nilai kontribusi Bidang Bina Marga terhadap indikator kinerja adalah sebesar 60,50%. Berdasarkan formulasi indikator, kontribusi masing-masing bidang</p> <p>Sumber Daya Air A. Upaya yang Telah Dilakukan - Melakukan pengumpulan, verifikasi, dan rekapitulasi dokumen operasi Blangko O dari masing-masing UPT PSDA sebagai dasar evaluasi kesesuaian pembagian air irigasi dengan RTTG. - Melaksanakan monitoring lapangan secara periodik untuk memastikan pelaksanaan pembagian air sesuai jadwal, pola tanam, dan kondisi ketersediaan air pada daerah irigasi kewenangan. - Melakukan koordinasi teknis dengan UPT PSDA dan petugas lapangan dalam rangka penyesuaian pembagian air terhadap dinamika kondisi lapangan dan kebutuhan tanaman.</p> <p>B. Faktor Penghambat / Keberhasilan - Faktor keberhasilan didukung oleh ketersediaan dokumen Blangko O yang relatif lengkap, koordinasi yang berjalan baik dengan UPT PSDA, serta pengalaman petugas lapangan dalam mengatur pembagian air irigasi. - Faktor penghambat berupa fluktuasi debit air akibat kondisi cuaca, keterbatasan sarana ukur debit pada beberapa lokasi, serta perbedaan kondisi jaringan irigasi yang mempengaruhi pemerataan distribusi air. C. Upaya Perbaikan ke Depan - Melakukan pemutakhiran dan standarisasi pengisian dokumen Blangko O agar data pembagian air irigasi lebih akurat dan mudah dianalisis secara berkala. - Meningkatkan intensitas monitoring lapangan dan koordinasi dengan UPT PSDA pada periode kritis musim tanam untuk menjaga kesesuaian pembagian air dengan RTTG. - Mengoptimalkan pemanfaatan data hasil monitoring sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan dalam pengaturan pembagian air irigasi pada periode berikutnya. Bina Marga A. Upaya yang telah dilakukan - Melakukan survey jalan dan jembatan sehingga menghasilkan data dasar jalan tahun 2025 - Meningkatkan intensitas penanganan jalan melalui Unit Reaksi Cepat atau Mandor Jalan - Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil pekerjaan konstruksi jalan B. Faktor Penghambat/Keberhasilan - faktor penghambat pemenuhan data dasar jalan: Jadwal survei kurang ideal Survei dilakukan bersamaan dengan musim hujan atau akhir tahun anggaran dan Target terlalu banyak dengan</p>

										<p>dihitung dari realisasi kinerja yang dikalikan dengan bobot kontribusi yang telah ditetapkan. Realisasi Bidang Sumber Daya Air sebesar 74,2% dengan bobot 40% menghasilkan nilai sebesar 29,68%, sedangkan realisasi Bidang Bina Marga sebesar 75,84% dengan bobot 60% menghasilkan nilai sebesar 45,50%. Total nilai gabungan kedua bidang tersebut sebesar 75,18%, yang selanjutnya dikalikan dengan bobot indikator "Cakupan Layanan Jalan dan Sumber Daya Air" sebesar 70%, sehingga diperoleh realisasi indikator kinerja sebesar 52,63%. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 52,37%, yang menunjukkan bahwa capaian kinerja telah melampaui target yang direncanakan. Capaian tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan lintas bidang berjalan efektif, sekaligus mendukung terwujudnya sasaran strategis Kepala Dinas dalam peningkatan layanan infrastruktur jalan dan sumber daya air secara berkelanjutan.</p>	<p>waktu pelaksanaan sangat singkat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Faktor Keberhasil: - adanya keseragaman metode survey sehingga memudahkan dan mempercepat pelaksanaan survey C. Upaya perbaikan Kedepan - Melakukan penjadwalan yang tepat dan merumuskan instrumen atau alat survey yang lebih baik dan aplikatif, sehingga survey dapat dilaksanakan lebih segera dan data dasar jalan dapat segera diterbitkan
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI s.d. TRIBULAN X	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPOHEN PERENCANAAN				PENJELASAN	ALTERNATIF / UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN	
						NO	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			Realisasi (%)
3	Meningkatnya layanan bangunan gedung dan penyelenggaraan penataan ruang	Cakupan layanan bangunan gedung dan penataan ruang dengan persentase 30%	12,51 %	13,60 %	108,71%	3	Meningkatnya layanan bangunan gedung dan penyelenggaraan penataan ruang	Rp 33.036.434.774,00	Rp 30.616.087.009,75	92,67%	<p>Pada Tahun 2025, indikator kinerja "Cakupan Layanan Bangunan Gedung dan Penataan Ruang" ditargetkan sebesar 12,51% dan terealisasi sebesar 13,60%. Capaian tersebut merupakan hasil kontribusi lintas bidang, dengan kontribusi Bidang Tata Ruang dan Pertanahan sebesar 65% serta Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi sebesar 35%. Kontribusi Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi dicapai melalui peningkatan layanan bangunan gedung negara, meliputi layanan legger sebanyak 2.703 bangunan gedung negara, layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebanyak 408 permohonan, serta layanan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) berupa 8 dokumen kajian SLF Bangunan Gedung Negara. Dengan mempertimbangkan bobot penilaian SLF sebesar 60% karena belum seluruhnya terbit SLF, diperoleh indeks layanan SLF sebesar 10,2. Dari total 4.271 bangunan gedung negara di Kabupaten Jombang, hasil perhitungan formulasi menunjukkan cakupan layanan bangunan gedung sebesar 8,007%, yang selanjutnya memberikan kontribusi 35% terhadap indikator kinerja.</p> <p>Sementara itu, kontribusi Bidang Tata Ruang dan Pertanahan diperoleh dari capaian Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, dengan realisasi Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang (IPPR) sebesar 88,36% dari target 79,52%, atau mencapai 112% dengan predikat "Baik" sesuai Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2021. Capaian tersebut berasal dari kinerja aspek perencanaan, pembinaan, pemanfaatan, dan</p>	<p>Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi A. Upaya yang telah dilakukan - Melakukan rapat internal dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PBG dan SLF secara berkala - Melaksanakan rapat konsultasi antara pemohon dengan Tim Profesi Ahli secara terjadwal sehingga tidak terjadi penumpukan permohonan - Melakukan pembagian tugas dalam pemrosesan permohonan sesuai dengan SOP - Melaksanakan koordinasi dengan berbagai instansi diantaranya BPKAD dan DPMPSTSP B. Faktor Penghambat/Keberhasilan Faktor penghambat - Keterbatasan sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan PBG dan SLF pada bangunan gedung negara - Rendahnya pemahaman perangkat daerah terkait dengan pemenuhan legalitas bangunan gedung negara Faktor Keberhasilan - Layanan PBG dan SLF telah terintegrasi dengan sistem di Kementerian yakni SIMBG sehingga pelayanan semakin cepat dan optimal - Tim sekretariat PBG melakukan tugas secara tepat waktu sesuai dengan SOP - Kerjasama yang baik antara Tim Sekretariat PBG, Tim Penilai Teknis, Tim Profesi Ahli dalam pelayanan PBG dan SLF C. Upaya perbaikan Kedepan - Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia untuk meningkatkan pelayanan PBG dan SLF kepada masyarakat - Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut dari dokumen legger bangunan gedung negara, pelayanan PBG dan pelayanan SLF - Melakukan sosialisasi kepada perangkat daerah, pelaku usaha maupun masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya PBG dan SLF - Membuat kebijakan/regulasi untuk meningkatkan kesadaran perangkat daerah, pelaku usaha maupun masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya PBG dan SLF Bidang Tata Ruang dan Pertanahan A. Upaya yang telah dilakukan - Melaksanakan klinik dan asistensi penyusunan RDTR secara mandiri melalui koordinasi daring dengan Kementerian ATR/BPN untuk menjaga keberlanjutan proses penyusunan RDTR, mengusulkan permohonan bantuan teknis kepada Pemerintah Pusat - Memanfaatkan forum koordinasi teknis dan konsultasi informal dengan narasumber dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah pusat guna memastikan kesesuaian dokumen RDTR dengan ketentuan yang berlaku dan implikasinya dalam fasilitasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. - Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dan menyesuaikan target internal penyelesaian RDTR dengan mempertimbangkan kondisi proses persetujuan substansi yang sepenuhnya bergantung pada penjadwalan Kementerian ATR/BPN - Melaksanakan sosialisasi berkaitan dengan produk RDTR yang telah ditetapkan untuk mendorong peningkatan pemahaman pelaku</p>

4	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80.01%	79.39%	99.23%	4	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	Rp 33.074.646.638,00	Rp 29.990.569.646,72	90.68%	<p>Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang diperoleh nilai realisasi Indeks Reformasi Birokrasi pada Tahun 2025 sebesar 79,39%, atau 99,23% dari target yang ditetapkan sebesar 80,01%. yang artinya realisasi belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. namun jika dilihat dari tahun sebelumnya nilai realisasi Indeks Reformasi Birokrasi mengalami peningkatan yaitu sebesar 74,28% pada Tahun 2024</p>	<p>A. Upaya yang telah dilakukan Telah meningkatkan kinerja Tim SAKIP dari segi perencanaan sampai dengan pelaporan kinerja sebagai wujud tindak lanjut atas rekomendasi dari laporan hasil evaluasi kinerja SAKIP dan RB B. Faktor</p> <p>Penghambat/Keberhasilan - Kelengkapan dan kualitas eviden pendukung RB masih kurang, baik dari sisi substansi maupun dokumentasi -Belum meratanya pemahaman pegawai terhadap implementasi RB C. Upaya perbaikan Kedepan</p> <p>-Penguatan perencanaan dan cascading kinerja - Peningkatan kualitas pengukuran dan pelaporan kinerja -Optimalisasi pemanfaatan rekomendasi hasil evaluasi SAKIP dan RB - Peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi internal secara berkala</p>
Rata-rata capaian			102.64%									

Atasan Langsung

Jombang, 14 Januari 2026
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

H. Warsubi, S.H., M.Si.


Bayu Pancoroadi, S.T., M.T.
NIP. 19741209 200312 1 002